

**ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM VILLAGE
DEVELOPMENT
(STUDY OF THE TINGKIR LOR SALATIGA VILLAGE)**

Herbasuki¹ and Nur Chasanah²

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Publik Undip Semarang

² Program Studi Ilmu Administrasi Publik Undip Semarang
e-mail: herbasukinurcahyanto@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Desa Tingkir Lor memiliki potensi konveksi dan mendapat banyak kunjungan wisatawan. Potensi tersebut telah ditangkap oleh pemerintah kota Salatiga untuk dikembangkan menjadi desa wisata sejak 2015. Sebagai desa wisata, partisipasi masyarakatnya penting, tetapi pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata tidak optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori tidak berpartisipasi. Masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa desanya telah ditetapkan sebagai desa wisata, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penetapan desa sebagai objek wisata oleh pemerintah kota Salatiga adalah wajib. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah kota Salatiga dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata dalam pemberdayaan desa Tingkir Lor sehingga dapat berkembang menjadi desa wisata yang maju.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Desa Wisata*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah ditetapkan sebagai leading sektor oleh Presiden Joko Widodo, sehingga semua sektor lain berkewajiban untuk mendukung. Tahun 2019 sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit. Pada tahun 2018 penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar 16,1 miliar dolar AS, dan pada tahun 2019 diharapkan dapat mencapai 17,6 miliar dolar AS. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) devisa pariwisata merupakan sektor yang berdampak luas, meliputi juga penerbangan, resort dan hotel, restoran dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sektor pariwisata mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pada

tahun 2020 pariwisata diharapkan dapat menjadi penyumbang devisa terbesar, yaitu sebesar US\$ 20 Miliar dan dampak devisa yang masuk diharapkan dapat pula dirasakan oleh masyarakat (CNBC Indonesia, 2019).

Kota Salatiga merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Kota Salatiga berada pada ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata 23°C - 28°C, yang menyebabkan kondisi udaranya sejuk. Selain memiliki udara yang sejuk kota Salatiga juga memiliki tingkat kesuburan tanah dan potensi alam yang cukup baik, karena Kota Salatiga dikelilingi oleh Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong.

Kelurahan Tingkir Lor terletak di kaki gunung Merbabu berada di ketinggian 660

m di atas permukaan laut. Tingkir Lor saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Perkembangan Tingkir Lor cukup pesat karena didukung berbagai faktor, antara lain dilewati oleh lokasi pintu keluar masuk tol Bawen-Salatiga, disamping itu di wilayah Tingkir Lor juga berkembang perumahan-perumahan maupun kapling siap bangun. Kelurahan Tingkir Lor banyak terdapat Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), diantaranya usaha konveksi yang dikelola oleh warga. Konveksi yang dibuat pun beragam dimulai dari celana, sprai, bed cover, kaset dan pakaian.

Sebagai desa wisata Tingkir Lor merupakan sentra konveksi yang menjadi destinasi wisata di kota Salatiga. Di kelurahan Tingkir Lor Salatiga terdapat berbagai jenis konveksi yang diproduksi oleh lebih 60 % masyarakat lokal. Masyarakat Tingkir Lor sudah puluhan tahun mengandalkan usaha konveksi sebagai mata pencaharian. Usaha konveksi berawal dari dukungan pabrik garmen Damatex dan Timatex. Masyarakat Tingkir Lor mendapat binaan dan pasokan bahan baku konveksi dari pabrik tersebut. Sampai saat ini, lebih dari tiga puluh rumah tangga bergantung dari sektor usaha ini. Berawal dari kekhasan dan keunikan Tingkir Lor inilah kemudian Pemerintah Kota Salatiga berusaha mengembangkan Tingkir Lor menjadi desa wisata dengan harapan akan menjadi destinasi wisata tingkat nasional bahkan mendunia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025 telah ditetapkan strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, diantaranya meliputi pengembangan potensi sumber daya lokal

melalui desa wisata. Menurut Inskeep (Argyo Demartoto, 2009) desa wisata didefinisikan sebagai “*where small group of tourist stay in or near traditional, often remote village and learn about village life and the local environment*”, Kawasan desa wisata juga dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata harus disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu perlu dilakukan perbaikan infrastruktur, kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta dilakukan promosi yang tepat (Bartoluci, et all, 2010; Grzinic dan Saftic, 2012; Candea dan Bogan, 2014).

Kelurahan Tingkir Lor berada di kecamatan Tingkir kota Salatiga. Keberadaan desa wisata di Tingkir Lor ditandai dengan warga Tingkir Lor yang beramai-ramai mengelola usaha konveksi di rumah. Selain usaha konveksi yang memiliki fungsi ekonomi, terdapat juga potensi alam yang menjadi daya tarik di wilayah ini. Warga memanfaatkan sumber daya alam dengan kemampuan berkreaitivitas. Beberapa bentuk wisata buatan yang ada adalah shelter Cengek dengan kursi beratap yang digunakan untuk tempat duduk dan kolam ikan yang dibangun dengan memanfaatkan aliran sungai Cengek yang deras. Selain itu juga ada tiga obyek wisata di Tingkir Lor, yaitu aktivitas fisik di luar ruangan (*outbond*), wisata membuat olahan produk khas Tingkir Lor seperti konveksi dan makanan, serta wisata sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang secara spesifik berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Aspek pengelolaan yang akan dibahas meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat setempat dan mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pengelolaan desa wisata di Tingkir Lor kecamatan Tingkir Salatiga.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata merupakan sektor unggulan dan memegang peranan penting dalam pembangunan di dunia termasuk Indonesia. Sektor ini telah diakui sebagai salah satu industri jasa penting utama di dunia, sesuai dengan pernyataan Schumacher, 2007 : *“Tourism is the leading and the single largest industry in the world of today. This sector has been recognized as one of the main important service industries in the world”* (Bhuiyan et. all. ,2013)

Pariwisata mencakup berbagai masalah potensial baik sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pemerintah memandang pariwisata sebagai alat pembangunan yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan tradisi dengan dampak negatif minimal. Liu dan Wall, (2006) mengatakan : *“Tourism is a potential matter in social, environmental and economic levels of many government agendas. Government sees tourism as a tool of development giving priority to protect the environments and traditions with minimum negative impacts”* (Bhuiyan et. all., 2013).

Hasil penelitian Fong dan Lo (2015) tentang pengembangan desa wisata di Kuching menunjukkan bahwa *“the findings suggest that local communities participation in decision making, empowerment, and*

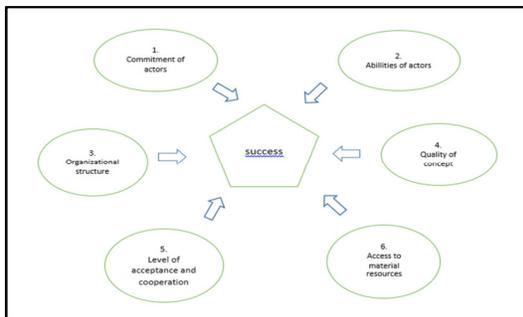
community knowledge about tourism do affect the sustainability of rural tourism development”. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan, dan pengetahuan masyarakat tentang pariwisata berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan desa wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Eshliki dan Kaboudi (2012) menunjukkan bahwa *“the result of analysis revealed that tourism influences the quality of local community members’ life. Also there is a significant relationship between factors affecting quality of community members’ life and their level of participation”*. Pariwisata mempengaruhi kualitas masyarakat setempat, dan juga terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Gao dan Wu (2017) menyimpulkan bahwa pengembangan desa wisata merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Perlu dikembangkan kegiatan yang bervariasi seperti kerajinan tangan dan kegiatan rekreasi. Hasil penelitian yang dilakukan Rasoolimanesh et.all (2017) menunjukkan pemerintah daerah harus meningkatkan dampak positif pariwisata dan persepsi penduduk terhadap pengembangan desa wisata agar dapat berpartisipasi dan sekaligus mengurangi dampak negatif yang mungkin ada. Keberhasilan pengelolaan desa wisata akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, namun dampak negatif perlu harus dapat diperkirakan dan dicarikan solusi.

Neumeier dan Pollermann (2014) menunjukkan bahwa desa wisata dapat berkontribusi dalam pembangunan pedesaan. Kesuksesan pengelolaan desa

wisata tergantung komitmen dan kemampuan aktor, kelembagaan kualitas konsep pengembangan, level penerimaan dan kerjasama serta dukungan politik dan pendanaan seperti terlihat dalam Gambar: 1. Aktor-aktor yang terlibat baik di di berbagai level harus menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam pengelolaan desa wisata. Konsep pengembangan desa wisata telah ditetapkan oleh pemerintah kota Salatiga berdasarkan SK Walikota no 556/349/107 pada tahun 2015 tentang Kelurahan Tingkir Lor Sebagai Lokasi Pengembangan DesaWisata.

Gambar 1
Enam Potensi Keberhasilan
Pembangunan
Desa Wisata

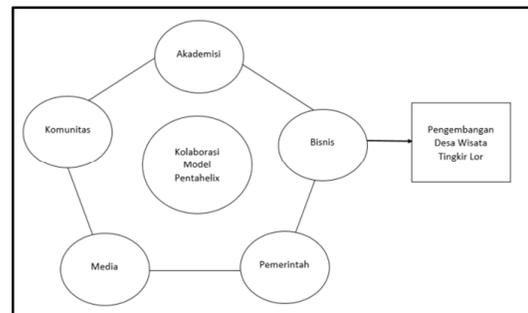


Sumber : Neumeier, Pollermann, 2014

Berdasarkan konsep Neumeier dan Pollermann, maka aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata menurut Halibas, A. S. et all (2017) terdiri dari Akademisi, Bisnis, Communities/komunitas, Government/pemerintah dan Media atau yang dikenal dengan konsep pentahelix atau ABCGM. Aktor-aktor ini mempunyai peran yang spesifik. Peran akademisi berbagi dengan pelaku UMKM tentang bisnis dan kajian tentang pengembangan wisata desa. Pelaku bisnis membantu UMKM dalam memasarkan dan memberdayakan hasil konveksi dan kuliner dan wisata alam. Komunitas dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata yang berperan

sebagai akselerator pengembangan desa wisata. Komitment pemerintah sangat diperlukan untuk pengembangan desa wisata dengan memfasilitasi berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata baik sebagai regulator maupun pengawas. Pemerintah daerah juga mempunyai peran sebagai koordinator semua *stakeholders*. Media mempunyai peran publikator dan pembentukan opini publik tentang desa wisata Tingkir Lor.

Gambar 2
Model Pentahelix dalam
Pengembangan Desa Wisata



Sumber : Halibas, A. S, et all.,

Desa wisata adalah suatu bentuk integritas antar atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa suatu desa yang memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi dan penginapan. Ciri dan daya tarik utama desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan. Menurut Ghanian et.all, (2011) desa wisata memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. *Tourism activities are done in rural areas.*
2. *Tourism activities are related to the villagers' life style.*

3. *Tourists' interests are based on agricultural products and the villagers' traditional life style.*
4. *Rural tourism must be developed in a sustainable manner.*

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa :

“kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.”

Di dalam kepariwisataan terdapat interaksi berbagai *stakeholders*, dan juga partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam pengelolaan desa wisata. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan memberikan masukan berupa pikiran tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat lokal memungkinkan masyarakat mengetahui segala aspek dalam rangka mewujudkan kesuksesan pengembangan yang pada akhirnya menimbulkan penghargaan yang tinggi dari masyarakat lokal atas hasil yang dicapai.

Berhasilnya suatu desa wisata tergantung pada seberapa besar partisipasi masyarakat berperanserta mensukseskan desa wisata tersebut. Partisipasi yang ideal adalah yang didorong oleh kesadaran dan ditentukan masyarakat sendiri, bukan

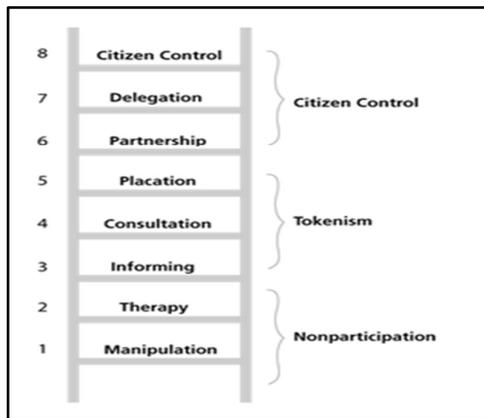
partisipasi yang digerakkan ataupun dipaksakan oleh pihak lain. Laksana (2013) menyebutkan bahwa secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang, kelompok maupun masyarakat dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang dapat menunjang keberhasilan sebuah program pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan dimaknai sebagai perwujudan kesadaran dan kepedulian juga tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang memiliki tujuan memperbaiki hidup, sehingga dalam konteks ini masyarakat diharapkan mulai sadar bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Mardikanto dan Poerwoko (2013) menyatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, namun juga memuat keterlibatan masyarakat. Keterlibatan ini diantaranya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan pembangunan (Keban, 2014). Masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai partisipasi masyarakat, maka partisipasi merupakan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam suatu program di lingkungan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan atau program tersebut.

Arnstein (1969), memperkenalkan "tangga" partisipasi warga yang terdiri dari delapan anak tangga. Secara lebih lengkap tangga partisipasi yang diajukan Arnstein (Aladalah et all, 2015) dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 3
Tingkat Partisipasi Masyarakat



Sumber: Arnstein dalam Aladalah, et.all, 2015

Tangga terbawah ada dua tingkatan yang digolongkan bukan sebagai partisipasi atau merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), meliputi: (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*therapy*). Kemudian diikuti dengan tangga (3) menginformasikan (*informing*), (4) konsultasi (*consultation*), dan (5) penentraman (*placation*), ketiga tangga

tersebut digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian wewenang / kekuasaan (*delegated power*), dan (8) pengendalian masyarakat (*citizen control*). Tiga tangga terakhir menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu secara terperinci, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti yakni untuk menghasilkan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata (Creswell, 2014).

Fokus penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan desa wisata. Locus penelitian di desa wisata Tingkir Lor, Kota Salatiga. Penelitian ini membutuhkan informasi beberapa pihak, yakni *stakeholders* terkait : pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan diwakili oleh : Dinas Pariwisata Kota Salatiga, Pengelola Hotel Laras Asri, Kepala Kelurahan Tingkir Lor, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat kelurahan Tingkir Lor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan merupakan salah satu bagian elemen dasar manajemen. Perencanaan diperlukan untuk menentukan rencana aksi yang akan dilakukan dalam pengelolaan desa wisata Tingkir Lor. Perencanaan awal desa wisata Tingkir Lor karena kurangnya destinasi wisata yang ada di Salatiga, sehingga Walikota menetapkan Kelurahan Tingkir Lor sebagai desa wisata pada tahun 2015. Pertimbangan penetapan Kelurahan Tingkir Lor sebagai desa wisata karena mayoritas masyarakat mempunyai usaha konveksi. Adanya potensi yang dimiliki Tingkir Lor tersebut membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembangkan destinasi wisata yang berbasis potensi lokal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dikatakan tidak ada karena penentuan desa wisata dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga (*top down*).

Pengorganisasian diawali dengan mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan haruslah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan pembagian dan pengelompokan pekerjaan didalamnya terdapat pula kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu mempermudah mencapai tujuan.

Pengorganisasian yang dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Pokdarwis terdiri dari masyarakat untuk mengelola potensi pariwisata yang dimiliki. Kinerja Pokdarwis

masih belum sesuai yang diharapkan, karena kesibukan masing-masing anggotanya. Selama ini kepengurusan Pokdarwis dikelola oleh anggota yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mengakibatkan kurang fokus dalam menangani proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor. Masyarakat lebih memilih pekerjaan sendiri atau mengelola usaha yang dimiliki daripada melakukan kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor.

Pendistribusian wewenang pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dapat diketahui dengan belum jelasnya pemberian otoritas atau wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan karena tidak adanya surat keputusan kepengurusan organisasi pengelola desa wisata.

Tahap pelaksanaan dalam proses pengelolaan di desa wisata Tingkir Lor yang dilakukan mencakup pemberian motivasi dan pengembangan potensi.

1. Pemberian Motivasi

Motivasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan bentuk dukungan atau semangat supaya masyarakat terus melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan potensi yang ada di desa wisata Tingkir Lor. Bentuk motivasi yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yaitu dengan memberikan arahan mengenai penataan tempat usaha masyarakat sekitar. Penataan dilakukan dengan cara memisahkan antara tempat untuk produksi serta tempat untuk meletakkan barang yang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Penataan usaha yang baik diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung maupun membeli hasil produk yang ada.

2. Pengembangan Potensi

Pengembangan potensi yang sudah dilakukan di Desa Wisata Tingkir Lor yaitu peningkatan mutu kualitas hasil usaha-usaha yang ada. Bidang usaha konveksi meningkatkan kualitas hasil produksi dengan cara memperbaiki kualitas bahan yang digunakan dan kerapian menjahit. Peningkatan kualitas mutu bidang usaha makanan dilakukan dengan cara memperbaiki mulai segi bahan-bahan yang digunakan, cara pengelolaan, sampai dapat proses pengemasan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga berupaya melakukan pengembangan potensi dengan memanfaatkan aliran sungai Cengek. Aliran sungai Cengek akan dikembangkan menjadi destinasi *river tubing* yang akan mengundang wisatawan datang berkunjung.

Pengawasan langsung maupun tidak langsung belum dilakukan oleh pihak Kelurahan Tingkir Lor maupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Masyarakat hanya berfokus pada kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi semata dan tidak terlibat dalam pengawasan pengembangan desa wisata.

Penetapan desa wisata bersifat mandatori tanpa pelibatan masyarakat. Pokdarwis yang dibentuk tidak mempunyai kegiatan karena anggota sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Pemerintah masih memegang kewenangan penuh dalam menjalankan program dan kegiatan, pertukaran informasi dan interaksi antar masyarakat dan pemangku kepentingan yang rendah, maka partisipasi masyarakat dapat dikatakan belum nampak (*non participation*).

Hasil penelitian menunjukkan adanya partisipasi swasta khususnya hotel Laras Asri dalam pengembangan desa wisata Tingkir Lor. Pengelola hotel Laras Asri yang telah menyediakan paket perjalanan

wisata dengan destinasi Desa Wisata Tingkir Lor. Wisatawan yang menginap di hotel Laras Asri akan dibawa berkeliling untuk menikmati pemandangan maupun wisata belanja produk hasil industri yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor. Keterlibatan swasta menunjukkan adanya suatu potensi untuk membantu mengembangkan desa wisata Tingkir Lor.

Hambatan yang dapat diidentifikasi yaitu rendahnya komitmen pemerintah Salatiga dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata yang juga kurang. Kepedulian yang kurang ini menjadi penyebab organisasi pengelola desa wisata (Pokdarwis) belum dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor.

PENUTUP

Kesimpulan

Didalam proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor peran pemerintah kota Salatiga sangat dominan. Penetapan desa wisata merupakan inisiatif pemerintah kota sehingga masyarakat kurang peduli dalam pengelolaan desa wisata Tingkir Lor. Keterlibatan pihak swasta merupakan aset untuk mengembangkan desa wisata Tingkir Lor. Pelaku bisnis yang tergabung dalam Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia Salatiga telah berkontribusi dalam pengembangan desa wisata dengan paket kunjungan wisata ke Tingkir Lor. Promosi masih terbatas dengan menggunakan web Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan obyek wisata yang ada di desa wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Masyarakat hanya sibuk mengelola usaha yang dimiliki, sehingga belum dapat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan desa wisata.

Saran

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata di kelurahan Tingkir Lor perlu :

1. Komitmen Walikota Salatiga untuk membangun desa wisata Tingkir Lor secara komprehensif dengan melibatkan aktor lain seperti akademisi, pelaku bisnis, masyarakat komunitas pariwisata dan media massa (Model Pentahelix). Aktor-aktor yang terlibat harus mempunyai peran yang spesifik dan bersinergi untuk pengembangan desa wisata di kelurahan Tingkir Lor.
2. Pemerintah kota Salatiga perlu menyiapkan MOU bagi semua *stakeholders* (Model Pentha Helix) agar dapat mendorong pengembangan desa wisata Tingkir Lor.
3. Pemerintah kota Salatiga harus dapat menyiapkan para pelaku pariwisata mempunyai sertifikat sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Perlunya pelibatan media massa dalam pengembangan pariwisata, sehingga mampu mengenalkan dan menciptakan opini publik yang positif terhadap keberadaan desa wisata Tingkir Lor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: ITS Press.
- Aladalah M, Cheung Y and Lee V, 2015. Enabling Citizen Participation in Gov. 2.0: An Empowerment Perspective. The Electronic Journal of e-Government Volume 13 Issue 2
- Bartoluci, Mato, et all, 2010, Guidelines for Croatian Tourism Policy in the Period of Recession, Zagreb, An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings: 1534-1547,1,3,6.
- University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia.
- Bhuiyan, Md. Anowar Hossain, et. all., 2013, Tourism Development in Malaysia from the Perspective of Development Plans, Asian Social Science; Vol. 9, No. 9
- Candea, Melinda; Bogan, Elena, 2014. Communication and Promotion Policy in Tourism Marketing in Romania, Quality - Access to Success, Academic Journal Vol 15 Faculty of Geography, Romania
- Creswell, John. W., 2014, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Demartoto, Argyo. 2009, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Fong, Sook Fun and Lo, May Chiun. 2015. "Community Involvement And Sustainable Rural Tourism Development: Perspective From The Local Communitie". European Journal of Turism Research, pp: 125-146
- Ghanian, M., Khani, F. and Baghayee L. (2011). "Evaluation of Entrepreneurship Climate in Rural Tourism (Case Study: Oraman Region)," Rural Researches, 2 (3):99-123
- Gao, Jing and Wu, Bihu, 2017. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management 63 (2017) 223e233. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman
- Grzinic, Jasmina; Saftic, Darko, 2012, Approach to the Development of Destination Management in Croatian. Management : Journal of Contemporary Management Issues 17.1
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI perspective. Interdisciplinary Journal

- of Information, knowledge, and Management, Vol 12
- Iswari Anggit, CNBC Indonesia, 2019, Gubernur BI Jelaskan Pentingnya Pariwisata Bagi Ekonomi RI, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190318165757-4-61379/gubernur-bi-jelaskan-pentingnya-pariwisata-bagi-ekonomi-RI>
- Keban, T. Yeremias. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
- Laksana, Septyasa. 2013. Bentuk – Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 1 (1)
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko S. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Neumeier, Stefan and Pollermann, Kim, 2014. Rural Tourism as Promoter of Rural Development - Prospects and Limitations: case Study Findings From a Pilot Project Promoting Village Tourism. DOI: 10.2478/euco-2014-0015.
- Rasoolimanesh, S. Mostofa, Ringle, Christian M., Jaafar, Mastura, and Ramayah, T., 2013. “Urban Vs Rural Destinations: Residents’ Perceptions Participation And Support For Tourism Development”. Science Direct, 60
- Eshliki, Sajad Alipour and Kaboudi, Mahdi. 2012. “Community Perception Of Tourism Impacts And Their Participation In Tourism Planning: A Case Study Of Ramsar, Iran”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 36, Published by Elsevier.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- SK Walikota Salatiga No 556/349/107 pada tahun 2015 tentang Kelurahan Tingkir Lor Sebagai Lokasi Pengembangan Desa Wisata